AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Implementasi Peran Audit BPK terhadap Pegauditan Keuangan Daerah dalam Sistem Pengelolaan dan Pendapatan di Kabupaten Manggarai Barat Kota Labuan Bajo

Theresia Muhul[1], Marcelina Jemaan[2], Felisia Celin[3], Afrandi Gandur[4], Marianus Tito[5], Purnama Baso[6]

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

arijemaan@gmail.com[2], velisiacelin@gmail.com[3], afrandigandur@gmail.com[4], marianus31tito@gmail.com[5], Purnamabaso@gmail.com[6]
E-mail Korespondensi : muhulrilan@gmail.com

Submitted: 16th November 2025 | **Edited**: 06th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Muhul, T., Jemaan, M., Celin, F., Gandur, A., Tito, M., & Baso, P. (2026). Implementasi Peran Audit BPK terhadap Pegauditan Keuangan Daerah dalam Sistem Pengelolaan dan Pendapatan di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 6*(1), 233-241.

ABSTRACT

Regional financial management in Indonesia continues to face challenges related to transparency, accountability, and the effectiveness of internal control, despite regular external oversight carried out by the Audit Board of Indonesia (BPK). These issues are also reflected in the financial governance of Manggarai Barat Regency, an area experiencing rapid economic growth driven by the development of Labuan Bajo as a national tourism destination. This study aims to examine the role of BPK's audit in strengthening the quality of regional financial reporting and improving revenue governance in Manggarai Barat. Using a descriptive qualitative approach and a case study design, the research analyzes audit documents, relevant regulations, and secondary literature to understand the audit process, key findings, and the extent of follow-up actions taken by the local government. The results show that the Regency has consistently received an Unqualified Opinion (WTP), indicating compliance with Government Accounting Standards. However, BPK still identified several weaknesses, particularly related to inadequate work volume, uncollected late penalties, and overpayments in certain local government units. These findings highlight that, although formal financial reporting is sound, operational practices require further improvement. BPK's recommendations have encouraged the strengthening of internal control, better administrative discipline, and improvements in the management of regional revenue. Overall, the audit plays an essential role in guiding the local government toward more transparent, accountable, and effective financial governance.

Keywords: BPK Audit, Regional Finance, Accountability, Transparency, Governance

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, serta sejalan dengan

prinsip tata kelola yang baik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagai bentuk pengawasan eksternal yang bersifat independen. Peran ini menjadi semakin penting mengingat berbagai temuan penyimpangan keuangan baik pada tingkat pusat maupun daerah masih kerap muncul dan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta praktik pengelolaan anggaran (Negara et al., 2024).

Dalam konteks pemerintahan daerah, desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluarannya sendiri. Namun, keleluasaan tersebut juga menuntut kapasitas aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang andal serta mematuhi ketentuan perundang-undangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah banyak dipengaruhi oleh efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kompetensi SDM, dan fungsi pengawasan internal (Asnida & Aprila, 2018; Keuangan & Pembangunan, 2024).

Kabupaten Manggarai Barat, dengan pusat pemerintahan di Labuan Bajo, merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan ekonomi cepat, terutama melalui sektor pariwisata. Pertumbuhan tersebut berdampak langsung pada peningkatan penerimaan daerah dan kompleksitas tata kelola keuangan. Walaupun pemerintah kabupaten secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK tetap menemukan sejumlah permasalahan seperti kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang belum disetor, serta kelebihan pembayaran pada beberapa perangkat daerah. Temuan ini menandakan adanya kesenjangan antara kualitas laporan keuangan yang secara formal telah memenuhi standar dan praktik operasional yang masih memerlukan pembenahan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai efektivitas audit BPK dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Berbagai penelitian sebelumnya banyak menyoroti pengaruh SPIP, kualitas audit, atau opini BPK secara umum (Oktaviani et al., 2020; Era et al., 2025), namun kajian yang mengaitkan peran audit BPK dengan penguatan tata kelola pendapatan daerah dalam konteks wilayah yang berkembang pesat seperti Manggarai Barat masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar,

tetapi juga melihat bagaimana temuan audit dan tindak lanjutnya berdampak pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit BPK terhadap pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk proses audit, temuan yang muncul, serta langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi audit BPK dalam memperkuat praktik good governance dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Audit sektor publik merupakan mekanisme pengawasan eksternal yang bertujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, audit tidak hanya memverifikasi kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menilai efektivitas sistem pengendalian intern serta kecukupan prosedur yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Peran audit semakin krusial karena laporan keuangan menjadi instrumen utama untuk menilai kinerja fiskal, efektivitas pengelolaan aset, dan optimalisasi pendapatan daerah.

BPK sebagai lembaga audit eksternal negara melaksanakan tiga jenis pemeriksaan yang mendasari proses evaluasi kinerja pemerintah daerah, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pemeriksaan ini, BPK memberikan opini profesional mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pendapat tersebut menjadi indikator penting bagi kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus menjadi dasar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Selain audit eksternal, keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi bagian integral dalam menciptakan proses pengelolaan keuangan yang efektif. SPIP berperan memastikan bahwa aktivitas pemerintah berjalan sesuai ketentuan, meminimalkan risiko penyimpangan, serta mendukung terciptanya laporan keuangan yang andal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SPIP berkorelasi positif dengan akuntabilitas laporan keuangan, efektivitas pengelolaan aset, serta

kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit (Putra & Mahardika, 2021; Wahyudi & Salim, 2020).

Di sisi lain, efektivitas audit BPK tidak hanya ditentukan oleh standar pemeriksaan, tetapi juga oleh respons pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan. Tindak lanjut yang tidak optimal menandakan kelemahan dalam kapasitas administrasi, koordinasi antar-OPD, serta kualitas pengendalian internal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan antara audit BPK, SPIP, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas publik diperlukan untuk menilai sejauh mana audit dapat mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik.

Literatur mengenai audit sektor publik di Indonesia juga menekankan pentingnya good governance sebagai kerangka normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi pilar yang saling terkait. Audit BPK berperan memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, sehingga hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan maupun pendapatan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus yang berfokus pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan dan pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami proses audit secara mendalam, menelusuri dinamika temuan pemeriksaan, serta menilai tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi, mencakup Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, peraturan perundang-undangan yang relevan, laporan kinerja pemerintah daerah, serta publikasi ilmiah yang menjelaskan praktik audit sektor publik dan tata kelola keuangan daerah. Proses pemilihan dokumen dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan peran audit BPK dan kondisi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana direkomendasikan oleh Creswell dan Poth (2019) dalam penelitian kualitatif berbasis dokumen.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan mengadaptasi model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Setiap dokumen direview untuk mengidentifikasi pola temuan audit, rekomendasi, dan respon

pemerintah daerah. Selanjutnya, informasi dianalisis secara tematik untuk melihat keterkaitan antara peran audit, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil temuan dari LHP BPK dengan laporan pemerintah daerah serta temuan penelitian sebelumnya. Teknik ini dianggap tepat untuk memastikan konsistensi informasi dan mempertajam interpretasi data, sebagaimana disarankan oleh Nowell et al. (2019) dalam analisis tematik kualitatif. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas audit BPK dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan tata kelola keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN

Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai Barat tampak jelas melalui serangkaian audit yang dilakukan setiap tahun. Kabupaten Manggarai Barat, dengan pusat pemerintahan di Labuan Bajo, merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup pesat terutama karena sektor pariwisata. Kondisi ini membuat kebutuhan terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel semakin penting agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikelola secara efisien dan transparan. Pada tahun-tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, hasil audit BPK juga mengungkap adanya kelemahan administratif yang memerlukan perhatian lebih serius, seperti kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang belum disetorkan, dan kelebihan pembayaran pada beberapa OPD.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Negara et al. (2024) yang menyatakan bahwa opini audit tidak selalu mencerminkan ketiadaan masalah operasional di dalam pengelolaan anggaran. Demikian pula, Oktaviani et al. (2020) menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan laporan keuangan sering kali tidak paralel dengan kualitas pelaksanaan anggaran di tingkat perangkat daerah. Dalam konteks Manggarai Barat, ketidaksesuaian tersebut terlihat pada beberapa proses administrasi yang belum tertib, khususnya dalam pengendalian pembayaran dan penyelesaian pekerjaan fisik. Dengan

demikian, audit BPK memberikan gambaran bahwa kualitas laporan keuangan secara formal telah baik, namun pelaksanaan operasional bekerja masih perlu diperkuat.

Selain temuan di atas, audit BPK menilai bahwa efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Manggarai Barat perlu ditingkatkan. Kelemahan pengendalian intern tersebut terlihat dari tidak optimalnya mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi antar-OPD. Hal ini sejalan dengan temuan Keuangan & Pembangunan (2024) yang menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian intern merupakan penyebab utama munculnya temuan audit pada pemerintah daerah. Bahkan Asnida & Aprila (2018) menekankan bahwa kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh keteraturan prosedur internal dan pemahaman aparatur terhadap fungsinya. Dalam konteks ini, audit BPK berperan mendorong pemerintah daerah melakukan penguatan kapasitas SDM, pembenahan administrasi aset, serta konsistensi dalam pencatatan pendapatan.

Dari sisi pendapatan daerah, audit BPK memberikan dorongan bagi pemerintah untuk memperbaiki proses pengelolaan PAD terutama yang bersumber dari pariwisata. Pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata Labuan Bajo mengharuskan pemerintah daerah memiliki sistem administrasi pendapatan yang adaptif, responsif, dan didukung basis data yang valid. Penelitian Anggita (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan dinamika ekonomi tinggi cenderung memiliki risiko akuntabilitas lebih besar jika sistem pelaporan tidak diperkuat. Hasil penelitian ini memperlihatkan fenomena serupa, di mana kompleksitas aktivitas ekonomi pariwisata menuntut pemerintah Manggarai Barat untuk menjaga ketertiban administrasi dan keakuratan pelaporan, sehingga tidak terjadi kehilangan potensi pendapatan.

Sebagai tindak lanjut atas temuan audit, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah perbaikan, seperti penagihan denda keterlambatan, penyetoran kembali kelebihan pembayaran, peningkatan mutu rekonsiliasi keuangan, dan penguatan koordinasi antara OPD dengan Inspektorat. Upaya-upaya ini selaras dengan hasil penelitian Era et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan tindak lanjut rekomendasi audit menjadi indikator utama tercapainya peningkatan kualitas tata kelola daerah. Sementara itu, penelitian Mulyadi & Marfiana (2021) menunjukkan bahwa tindakan korektif atas temuan audit mampu meningkatkan persepsi publik terhadap integritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa audit BPK bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai alat

pembinaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan audit BPK pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memperlihatkan dua gambaran utama: pertama, capaian formal berupa Opini WTP yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar pelaporan; kedua, adanya kelemahan internal yang mengharuskan pemerintah melakukan perbaikan berkelanjutan. Analisis ini memperkuat pandangan penelitian sebelumnya bahwa audit berperan strategis tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah. Melalui pemeriksaan yang mencakup aspek kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, dan kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Hasil pemeriksaan selama beberapa tahun menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai Barat konsisten memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mencerminkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan tersedianya informasi keuangan yang dapat diandalkan.

Meskipun demikian, audit BPK juga mengungkap sejumlah kelemahan operasional, seperti kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang belum disetorkan, serta adanya kelebihan pembayaran pada beberapa perangkat daerah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP tidak sepenuhnya menggambarkan tidak adanya permasalahan dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan perlu didukung oleh praktik administratif yang lebih tertib, sistem pengendalian internal yang lebih kuat, serta kompetensi aparatur yang memadai.

Rekomendasi BPK terbukti berperan sebagai pendorong perbaikan manajerial, terutama dalam penguatan pengendalian internal, penyempurnaan proses rekonsiliasi keuangan, serta peningkatan ketertiban administrasi. Tindak lanjut yang konsisten dari pemerintah daerah tidak hanya memperbaiki kelemahan yang ditemukan, tetapi juga

meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pengelolaan pendapatan yang lebih efektif, khususnya dalam konteks Manggarai Barat sebagai kawasan pariwisata strategis.

Secara keseluruhan, audit BPK tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kepatuhan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Ke depan, penelitian mengenai efektivitas tindak lanjut rekomendasi serta pengaruhnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi arah studi lanjutan yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, I., & Hartini, S. (2021). Peran audit kinerja dalam meningkatkan efektivitas program pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(2), 120-134.

Anggita, R. (2023). Penguatan akuntabilitas pendapatan daerah pada wilayah pariwisata. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(2), 112-124.

Asnida, N., & Aprila, N. (2018). Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern, sistem informasi manajemen, dan kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8, 213-224.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2020). *The SAGE handbook of qualitative research*. SAGE Publications.

Dewi, K., & Hapsari, R. (2019). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Daerah*, 6(1), 15-27.

Era, T. D., Putri, N., Pratama, I. N., Auzandika, I., Hamidi, I., Aulia, F., Gunawan, S., Putra, R. M., & Mataram, U. M. (2025). Kajian literatur audit sektor publik di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 69-79.

Fahri, A., & Nurjanah, E. (2023). Audit sektor publik dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 66-80.

Halim, T., & Susanto, B. (2022). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 8(2), 101-119.

Keuangan, P., & Pembangunan, D. A. N. (2024). Determinan kualitas hasil pengawasan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 193-209.

Mardiasmo. (2019). Akuntansi sektor publik: Reformasi pengelolaan keuangan daerah. *Penerbit Andi*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.

Mukhlis, A., & Darmawan, R. (2020). Efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit dalam meningkatkan akuntabilitas daerah. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 5(3), 173-186.

Mulyadi, T., & Marfiana, N. (2021). Dampak tindak lanjut audit terhadap persepsi transparansi pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 33-45.

Negara, A. K., Istianah, I., Sari, N. P., & Indriani, V. (2024). A systematic review of public sector audits in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Negara*, 10(1), 33-54.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1-13.

Oktaviani, M. A., Sari, D. P., & Mandala, W. (2020). Pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Mandiri*, 21(1), 186-193.

Putra, A., & Mahardika, I. (2021). Hubungan SPIP dan tata kelola keuangan daerah. *Jurnal Sistem Pemerintahan*, 9(1), 41-57.

Rahmawati, Y., & Imran, F. (2022). Pengawasan eksternal BPK dan kualitas tata kelola pemerintah daerah. *Jurnal Governance Review*, 10(1), 55-70.

Ritchie, J., Lewis, J., McNaughton Nicholls, C., & Ormston, R. (2020). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. SAGE Publications.

Sari, P. M., & Rahmadana, M. F. (2021). Efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 102-117.

Silverman, D. (2020). *Interpreting qualitative data*. SAGE Publications.

Thomas, G. (2021). *How to do your case study*. SAGE Publications.

Wahyudi, M., & Salim, A. (2020). Kualitas pengendalian internal dan implikasinya terhadap akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 190-204.

Wibowo, H., & Arimbawa, I. (2019). Kualitas laporan keuangan dan tantangan transparansi pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 145-160.

Yin, R. K. (2019). *Case study research and applications: Design and methods*. SAGE Publications.

Yuliani, R., & Hartati, S. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah: Tinjauan regulasi dan implementasi. *Jurnal Tata Kelola*, 5(3), 145-158.